

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia berdampak terhadap masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, migrasi, dan sektor-sektor kependudukan lainnya. Pembangunan Nasional merupakan sebuah rangkaian program atau kegiatan pemerintah dalam membangun daerah-daerah yang menjadi Kesatuan Negara Republik Indonesia. Menurut Mohammad Ali (2009: 31) menjelaskan mengenai pembangunan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah melibatkan masyarakat karena pada hakekatnya hasil pembangunan adalah untuk memnuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan yang diupayakan melalui pembangun bukan semata-mata mencakup aspek material saja, tetapi seluruh aspek kehidupan, termasuk mental-spiritual dan kemampuan dalam berbagai bidang. Untuk ini masyarakat perlu didorong dan difasilitasi untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, karena pihak utama yang menerima hasil pembangunan adalah setiap anggota masyarakat. Ini berarti dalam kegiatan pembangunan seharusnya setiap anggota masyarakat bukan hanya dapat menikmatinya tetapi juga menyadari dan merasa memiliki segala hasil pembangunan yang dicapai.”

Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. Disini masyarakat

dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain.

Strategi merupakan suatu hal penting dalam dunia usaha pada saat ini. Bukan hanya kepada para pelaku usaha/bisnis. Strategi yang dimaksudkan ialah salah satu kemampuan mereka sebagai pelaku usaha dalam menyusun suatu upaya bisnis dan mereka percaya bahwa upaya yang mereka lakukan sudah mereka ketahui dan mengerti dengan baik. Membentuk Kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang membantu pelaku usaha dalam mengelola usahanya seperti pembuatan sertifikat penting, menyalurkan relasi kerja, melakukan pelatihan dan penyuluhan usaha mikro serta memfasilitasi usaha mikro untuk lebih berkembang.

Menurut Titik Sarika Pertomo dan Rachman Soedjoedono (2004:26) menjelaskan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, sebagai berikut:

“Apabila UKM dapat mengadaptasi, menguasai dan menembangkan teknologi serta selalu menciptakan inovasi, maka hal tersebut akan memotivasi UKM untuk mengekspor produknya UKM agar dapat memanfaatkan peluang pasar diluar negeri harus dibantu oleh kebijaksanaan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan non pemerintah yang mendukung, fasilitas infrastruktur yang memadai, kestabilan politik dan penegakan hukum yang adil dan bersih. Di samping itu UKM memerlukan suatu badan atau Lembaga yang selalu memberikan informasi bisnis yang akurat dan terus menerus”.

Pelaku usaha mendapatkan dukungan oleh pemerintah sebagai mitra atas usaha yang mereka bentuk, dan pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dan instansi lain untuk menyalurkan lebih banyak lagi aspirasi yang didapatkan dan mempermudah hubungan pihak pelaku usaha mikro dengan pihak lain. Tujuan dibentuknya strategi untuk pelaku usaha mikro, untuk mengetahui tujuan dan target yang akan dicapai dalam kegiatan produksi dan pemasaran dari hasil usaha mereka dalam bentuk tupoksi yang akan dijalankan mulai dari atasan sampai dengan pegawai di dalam Usaha Mikro tersebut. Begitu pula dengan Pemerintah Daerah, memiliki startegi yang terjabarkan dalam Peraturan Daerah dan Rencana Strategis pada Perangkat Daerah terkait yang dibuat dalam mendukung pemberdayaan dan perkembangan usaha mikro. Sampai

kepada pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang mampu mandiri dalam kegiatan produksi, promosi dan pemasaran dengan ruang lingkup pasar yang luas.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya.

Menurut Payne (dalam RUMKMinto. 2008: 77-78), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya, ditujukan guna:

*”To help clients gain power of decisions and action over their own lives by reducin the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients.”*

(Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disinggung di atas, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dapat diberdayakan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan UMKM. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber

pendapatan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3 tujuan dari dikembangkannya UMKM adalah, “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM juga merupakan kelompok perekonomian terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi desiminotor pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif.

Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini, karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Adanya UMKM tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan, tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan sektor UMKM dapat melibatkan banyak orang dengan beragam usaha.

Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dapat dilakukan dengan membentuk program pembinaan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui perangkat daerah terkait pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kanupaten Bekasi. Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi yang bertugas untuk mengurus, mengatur, serta mengelola urusan bidang Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan Koperasi, dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Pembinaan yang dilakukan

bertujuan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi dibentuknya UMKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Selanjutnya, mengenai hal yang akan dikaji lebih mendalam oleh peneliti adalah bagaimana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi. Hal tersebut didasari oleh asumsi bahwa sektor perdagangan selama ini semakin berkembang dengan pesat. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi DiskopUKM sudah dijelaskan dalam Rencana Strategis 2023-2026 yang Sebagian besar program-program yang terbentuk mendukung akan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Bekasi, sebagai berikut:

- a.** Pengembangan sumber daya manusia, baik itu sumber daya manusia pada pelaku usaha mikro serta sumber daya manusia aparat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi.
- b.** Pengembangan pasar dengan peningkatan jaringan pemasaran baik dengan membentuk UMKM center maupun pameran-pameran di dalam negeri maupun luar negeri.
- c.** Pengembangan kemitraan antar koperasi dan UMKM dengan dunia usaha termasuk pihak perbankan.
- d.** Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung penciptaan nilai tambah terhadap produk-produk dalam negeri dan pengembangan jasa kreatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi.
- e.** Mendorong tumbuhnya wirausaha baru dengan pemberian intensif-intensif seperti kemudahan dalam perizinan dan kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal.

Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menggambarkan perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi sejak 3 Tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Perkembangan UMKM Kabupaten Bekasi sejak 3 Tahun terakhir**

No.	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2020	20.315
2.	2021	20.610
3.	2022	19.111

Sumber: BPS Prov Jawa Barat, 2022

Berdasarkan data-data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Bekasi menurun dilihat dari data statistik 3 tahun terakhir dan menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena bidang ini menjadi salah satu fokus pembangunan dengan memberdayakan masyarakat. Selain itu perkembangan tersebut membawa dampak yang kurang positif terhadap penyerapan tenaga kerja hingga ribuan orang, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

Dengan demikian dari Penjelasan yang sudah peneliti jabarkan, Peneliti akan mengangkat judul “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi” Studi di lakukan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi. Agar peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana relevansi dari pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokalnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam pemberdayaan UMKM sehingga hasil penelitian membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi lokal selanjutnya.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu Bagaimana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya memiliki tujuan, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi.

## **1.4 Signifikansi Penelitian**

### **1.4.1 Signifikansi Akademik**

Berdasarkan permasalahan tentang “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi” diharapkan penelitian ini berjalan lancar. Selain itu adanya hasil studi terdahulu yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam memperkaya referensi penulis menyajikan beberapa penelitian sebagai berikut:

Fajar Febrian Putranto, dkk. Berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Samarinda”. 2019. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun alternatif strategi bagi para pemangku kebijakan dalam mengembangkan sektor usaha mikro di Kota Samarinda guna mendukung program Pemerintah Kota Samarinda melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT) yang dilanjutkan dengan menyusun *Quantitative Strategies Planning Matri* (QSPM) untuk menentukan urutan strategi yang paling prioritas untuk diimplementasikan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang menempati prioritas pertama dalam

pengembangan usaha mikro di Kota Samarinda yaitu melakukan promosi produk usaha mikro secara terencana dan berkelanjutan. Strategi prioritas kedua yaitu melakukan pemasaran produk usaha mikro melalui e-commerce lokal dan nasional. Mendirikan inkubator bisnis teknologi merupakan strategi yang menempati prioritas ketiga. Sementara itu, strategi mendorong pihak swasta untuk berperan aktif dalam pemberdayaan usaha mikro menempati urutan prioritas keempat. Prioritas strategi kelima yaitu melakukan penguatan regulasi daerah untuk pemanfaatan produk usaha mikro lokal dan perencanaan tata ruang sentra usaha mikro.

Adil Makmur Sentosa. Berjudul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi”. 2020. Penelitian ini mendeskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kota Bekasi telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Bekasi. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kota Bekasi, antara lain: 1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian.

Silvirgin Latisia. Berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri”. 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi DinKop UMKM dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada sektor perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan Dinkop UMKM dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah kurang berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada fase inisial cukup berperan dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan. Selanjutnya pada fase partisipatoris masyarakat dan pemerintah sudah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase selanjutnya



pemerintah masih terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM.

Mohammad Rohedi. Berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”. 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam hal ini adalah Disperindag yang mengeluarkan strategi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil kegiatan dan pembahasan dalam penelitian ini, tentang Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep dilihat dari empat (4) indikator yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, strategi yang keluaran dapat dikatakan berhasil, namun tidak sepenuhnya pelaksanaan dari strategi tersebut berjalan sesuai dengan harapan.

Syaakir Sofyan, Ahmad Arief. Berjudul “Strategi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memberdayakan Usaha Mikro di Pasar Inpres Manonda Palu”. 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi langkah-langkah dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam pemberdayaan usaha mikro di pasar Inpres Manonda Palu, Hasil dari kajian menunjukkan gambaran umum usaha mikro di pasar Inpres Manonda Palu jumlah pelaku usaha sebanyak 1040 pedagang tercatat di Kantor Pasar dengan jumlah terbesar pedagang campuran pedagang/hasil pertanian seluruhnya 205 perdagangan. Semua kebutuhan masyarakat secara umum dapat dipenuhi di pasar Inpres Manonda Palu.

Aminatul Maghfiroh, Lilik Rahmawati. Berjudul “Pengembangan UMKM Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang”. 2021. Fokus penelitian ini adalah Peran dan Strategi Dinas Koperasi dan Mikro Usaha dalam mengembangkan UMKM secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan

memberikan gambaran dan penjelasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UKM Jombang. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data penelitian dan pembahasan tentang peran dan strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Jombang adalah Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator tidak hanya mengawasi, mengatur, dan menindaklanjuti para pelaku UMKM, melainkan juga memberikan sarana dan prasarana, melakukan pelatihan keterampilan, membantu proses pemasaran, dan membantu dalam segi finansial juga. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang dalam mengembangkan UMKM melakukan implementasi dalam mendukung proses promosi produk UMKM. Adapun strategi yang dilakukan melalui pendekatan pembinaan, pelatihan-pelatihan, fasilitas kebutuhan para pelaku UMKM dan pendampingan yang sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meskipun masih terdapat kekurangan dari segi pemberdayaan.

Sony Hendra Permana. Berjudul “Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”. 2017. Penelitian ini berupaya menguraikan upaya penanggulangan masalah sosial tersebut melalui pemberdayaan, khususnya melalui peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisa yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM perlu selalu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sendiri. Dalam hal permodalan, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah cukup baik, mulai dari program KUR sampai dengan paket kebijakan yang berpihak pada UMKM. Dalam hal pemasaran, strategi pengembangan UMKM dapat memanfaatkan pertumbuhan internet saat ini.

Saif Alhawariy. Berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus”. 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan

UKM Kabupaten Kudus dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui teori implementasi Edwards III. Hasil dari Penelitian ini Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus telah menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro melalui kegiatan pendataan, peningkatan kualitas usahawan, memfasilitasi ke sumber pembiayaan, menyederhanakan pelayanan perizinan dan memfasilitasi pemasaran. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dengan memperhatikan factor-faktor penghambat yang ada, yaitu komunikasi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

Dian Ratika Yuniasari. Berjudul “Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha tas di Desa Loram Kulon.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan di Desa Loram Kulon sebagai sentra pembuatan tas belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dari dinas sendiri belum ada agenda khusus untuk desa tersebut. Selain itu salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemberdayaan adalah tidak adanya organisasi ataupun paguyuban yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha tas dikarenakan dari masyarakat sendiri juga sulit untuk diajak berorganisasi sehingga pemerintah juga mengalami kesulitan untuk menyalurkan bantuan.

Prasetio Ariwibowo. Berjudul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia” 2017. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi pengembangan pasar bagi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kualitas usaha di Indonesia dan merumuskan rekomendasi penerapan strategi mempertahankan dan peningkatan kualitas UMKM di masa yang akan datang. Hipotetik solution dari kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Atas dasar uraian di atas, untuk mengetahui penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu ditulis dalam tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	2	3	4	5
1.	Fajar Febrian Putranto, 2019	Strategi Pengembangan Usaha Mikro di Kota Samarinda	Deskriptif Kualitatif	Strategi prioritas pertama dalam pengembangan usaha mikro di Kota Samarinda yaitu melakukan promosi produk ukm secara terencana dan berkelanjutan.
2.	Adil Makmur Sentosa, 2020	Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Kota Bekasi	Deskriptif Kualitatif	Diskoperindagpar Kota Bekasi telah melaksanakan strategi dalam memberdayakan UMKM di Kota Bekasi, antara lain: Strategi peningkatan kemampuan finansial, pengembangan pemasaran, pengembangan SDM, dan strategi pengaturan pengendalian

1	2	3	4	5
3.	Silvirgin Latisia, 2017	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri	Deskriptif Kualitatif	Strategi Pemberdayaan Dinkop UMKM dalam memberdayakan umkm kurang berjalan optimal karena terkendala pada penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UMKM
4.	Mohammad Rohedi, 2015	Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Kualitatif	Dilihat dari empat indikator yang dijadikan focus dalam penelitian, strategi yang dikeluarkan dapat dikatakan berhasil, namun tidak sepenuhnya pelaksanaan dari strategi tersebut berjalan sesuai dengan harapan.
5.	Syaakir Sofyan, 2017	Strategi Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu Dalam Memberdayakan Usaha Mikro di Pasar Inpres Manonda Palu	Kualitatif	Dengan Jumlah pelaku usaha sebanyak 1040 pedagang tercatat di kantor pasar dengan jumlah pedagang hasil pertanian seluruhnya 205 pedagang. Semua kebutuhan masyarakat secara umum dapat dipenuhi di pasar Inpres Manonda Palu
6.	Aminatul Maghfiroh & Lilik Rahmawati, 2021	Pengembangan UMKM Melalui Peran Serta Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang	Deskriptif Kualitatif	Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai fasilitator tidak hanya mengawasi, mengatur, dan menindak lanjuti para pelaku UMKM, melainkan juga memberikan sarana dan prasarana, melakukan pelatihan keterampilan, membantu proses pemasaran, dan membantu dalam segi finansial.

1	2	3	4	5
7.	Sony Hendra Permana, 2017	Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia	Deskriptif Kualitatif	Upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan UMKM perlu selalu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha sendiri
8.	Saif Alhawariy, 2021	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Disnakerperinkopukm Kabupaten Kudus.	Kualitatif	Pemerintah Kab. Kudus melalui disnakerperinkopukm telah meyenggarakan pemberdayaan usaha mikro melalui kegiatan pendataan, peningkatan kualitas usahawan, memfasilitasi ke sumber pembiayaan, menyederhanakan pelayanan perizinan dan memfasilitasi pemasaran.
9.	Dian Ratika Yuniasari, 2018	Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan UMKM Sentra Tas di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Deskriptif Kualitatif	Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan di desa Loram Kulon sebagai sentra pembuatan tas belum berjalan secara maksimal. Ini terjadi karena dari dinas sendiri belum ada agenda khusus untuk desa tersebut.
10.	Prasetio Ariwibowo, 2017	Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perekonomian di Indonesia	Kualitatif	Dari kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dan pembangunan perekonomian di Indonesia khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Tentang penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa usaha mikro menarik untuk dijadikan topic penelitian dengan berbagai macam permasalahannya dan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan karena kondisi obyek yang alamiah dan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).

Uraian tersebut menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian tentang “Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi”. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut terletak pada locus dan waktu penelitian. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama memiliki focus pemberdayaan pelaku UMKM serta metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif.

#### **1.4.2 Signifikansi Praktis**

Penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar strata satu di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi, selain itu untuk Program studi Ilmu Pemerintahan, penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi tentang Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Bekasi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan mengurai latar belakang masalah mengenai Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

di Kabupaten Bekasi, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini berisikan perspektif teoritik, definisi, kerangka pemikiran dan asumsi penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V SIMPULAN**

Bab ini berisikan simpulan dan rekomendasi yang menyimpulkan suatu bagian akhir pada penelitian yang memuat isi keseluruhan penelitian dengan lebih singkat, padat, dan jelas tentang penelitian tersebut.